

GAGASAN

Rabu 9
28 JANUARI 2015

Komunikasi Pejabat Negara

OLEH DR. HARLIANTARA

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Tedjo Edy Purdijatno, menyatakan pendukung KPK sebagai rakyat yang tidak jelas. Pernyataan tersebut menjadi blunder komunikasi bagi pemerintah yang dampaknya makin memperkeruh suasana. Para menteri yang duduk di Kabinet Kerja sebaiknya menata kembali komunikasi politiknya.

Rivalitas antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menimbulkan kontraproduktif bangsa yang luar biasa. Energi bangsa habis sia-sia menghadapinya. Publik juga tenggelam karena kegaduhan politik yang tidak perlu. Presiden Joko Widodo sebaiknya segera membentuk tim independen untuk mengatasi rivalitas kontraproduktif KPK-Polri dengan cara memperbaiki sinergi dan sistem komunikasi antardua lembaga tersebut.

Para penyidik KPK, yang merupakan ujung tombak pemberantasan korupsi negeri ini, mulai terganggu dengan manuver politik. Apalagi sebagian besar penyidik KPK adalah personel kepolisian sehingga sangat membutuhkan harmonisasi komunikasi dua institusi penegak hukum itu.

Sejak Kabinet Kerja dibentuk telah mengalami beberapa kali kendala berkomunikasi politik. Utamanya bila harus mengelaborasi masalah politik. Beberapa menteri menjadi bulan-bulanan media massa dan para pengamat politik. Hal ini diperparah sikap menteri yang acap kali berpikir sektoral.

Hingga kini gaya berkomunikasi Kabinet Kerja masih terkesan kaku, monoton, dan hanya berputar-putar dalam wacana itu-itu. Efeknya menimbulkan blunder dan kurang menstimulasi derajat kecerdasan eksponen bangsa. Olah komunikasi politik baik dengan rakyat, antar lembaga negara, media masa, maupun lainnya yang menempel pada Kabinet Kerja seharusnya segera di-up-grade.

Ironisnya *inner circle* Presiden Jokowi justru *napak tilas* cara-cara Orde Baru yang memosisikan Mensesneg dan Mensekab sebagai Jubit Presiden sehingga semuanya di-set-up kembali dalam gaya *klemak-klemek*, kaku, serta ketiadaan wacana-wacana segar.

Solusi teknis utamanya dalam konteks mengatasi olah komunikasi politik bagi lembaga kepresidenan sebenarnya dapat ditutup dengan mengadakan Jubit Presiden. Tetapi eksistensi dan sepak terjang para Jubit Presiden harus dirancang agar tidak bermasalah seperti era Gus Dur.

Presiden Jokowi sebetulnya sangat memerlukan seorang Jubit. Keberadaannya



ny dapat membuka kebutuhan komunikasi massa dari lembaga kepresidenan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dia juga diperlukan untuk memperlancar pengomunikasian kebijakan pemerintah dalam skala besar dan frekuensi tinggi.

Selain itu, eksistensi Jubit Presiden diharapkan dapat menembus belantara komunikasi yang konkritnya berupa komplikasi sistem manajemen pemerintahan dan kebebasan komunikasi politik sebagai warisan pemerintahan lama. Efeknya hingga saat ini sulit tercipta sebuah sinergi antar-institusi seperti kasus Polri-KPK.

Kerja Jubit harus kompatibel dengan spesifikasi gaya manajemen presiden.

bulkan turbulensi.

Publik berharap agar eksistensi Jubit Presiden tidak sekadar tugas rias kebijakan presiden. Dia harus memahami metode dan operasional dari para juru bicara Gedung Putih. Meskipun kondisi sosial politiknya sangat jauh berbeda, esensi Jubit Gedung Putih Amerika Serikat penerapannya sudah ideal. Kelembagaan, yudisial, dan hubungan timbal balik dengan media setempat sudah mapan. Apalagi didukung lembaga *clearing house*.

Intrik

Sementara itu, kondisi di Indonesia sering kali muncul turbulensi karena intrik politik para elite politisi, terutama merekayang berada di daerah abu-abu. Kelompok ini tidak memosisikan diri se-

Jubit di sini boleh mengambil paradigma Jubit Gedung Putih. Mereka memberi ruang bagi pers seluas-luasnya. Dengan begitu media bisa melakukan *in-depth reporting* agar menghasilkan tulisan lebih lengkap, mendalam, dan analitis. UU Kebebasan Informasi yang telah diadopsi kembali oleh Kongres pada tahun 1996 juga mendukungnya. UU tersebut memberi hak kepada rakyat untuk mendapatkan informasi dari pemerintah federal. UU dilaksanakan *The Freedom of Information Clearinghouse*.

Lembaga ini laba tersebut menyediakan bantuan teknik dan bukan bagi individu kelompok kepentingan dan media massa yang ingin mendapat akses informasi dari pemerintah. *The Clearing House* juga menyediakan bantuan advokasi di pengadilan untuk kasus tertentu untuk melawati dan memberantas *public deception* pejabat negara.

Bagi insan per sender, lembaga *clearing house* tersebut sangat membuka peluang profesi. Sebab praktisi ini dapat meminta dan menerima setiap dokumen, file, atau catatan lain yang dimiliki pemerintah federal. Mekanisme seperti inilah yang memungkinkan kasus-kasus besar, secara tidak langsung, terbongkar. Salah satu kasus yang mencuat karena sinergi *clearing house* dengan pers adalah skandal *Integate* era George Bush.

Kandungan informasi Jubit presiden sebaiknya tidak didominasi dengan *in-mat personality feature* dan *historical feature*, yakni sebatas memperkembangkan wawasan serta pendapat presiden dalam framing "kecap cap jempol". Informasi harus juga dilindungi dengan *journal* yang *publi-publi* juga. Selain itu, seorang Jubit harus sering memberi *patron* *exploratory* atau *background feature*, yakni menjelaskan latar belakang suatu kebijakan atau peristiwa yang baru terjadi dan sudah dibentengi *kuil-kuilnya*.

Maka, dia harus mampu menyimpulkan dan mengelaborasi gagasan-gagasan presiden. Dia tidak perlu larut terlalu jauh untuk meladeni *suara-suara* lawan politik yang bermaksud politik peruh intrik. Pekar komunikasi *berkaliber* dunia berkompentensi berat pun tak mampu mengelaborasi *ucapan-ucapan* elite politisi negeri ini.

Tugas Jubit saat ini memang pelik, apalagi bila dia harus meladeni *suara-suara* oposisi dengan jalan memelototi dan men-jait *accusatory* pernyataan. Saatnya Presiden Joko Widodo menunjuk seorang Jubit guna menjadi *kepanjangan* pikiran dalam memisahkan perpecah politik rakyat dan mengatasi kebebasan komunikasi. ■

Penulis dosen Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University



« Presiden Jokowi sebetulnya sangat memerlukan seorang Jubit. Keberadaannya dapat membuka kebutuhan komunikasi massa dari lembaga kepresidenan dalam menjalankan roda pemerintahan. »

Jubit Presiden, utamanya di Amerika, mampu mencegah serta mengeliminasi dampak *dis-influencing*. Jubit harus berusaha keras menghancurkan langkah-langkah lembaga kepresidenan dari kegelapan memberikan motivasi kebangsaan serta mencegah memburuknya komunikasi politik dengan rakyat. Pesan-pesan politik lembaga kepresidenan (dan wapres) sebagai pemimpin bangsa jangan sampai memim-

bagai oposan sejati, tetapi sering mengkritik pemerintah habis-habisan.

Jubit Kepresidenan diharang menaburkan *public deception* (kebobongan massa). Dia harus cerdas memosisikan diri dalam melayani komunikasi rakyat. Apa pun kondisinya, dia tidak boleh memutarbalikkan fakta. Juga tidak boleh ada gangguan relasional media massa dengan otoritas protokol istana yang biasanya cenderung membatasi ruang gerak pers.